

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA
MENGHINDARI KECURANGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh:

MARIA FATIMA BERE

2017110155

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENGHINDARI KECURANGAN DI DESA TLEKUNG KOTA BATU

Maria Fatima Bere¹ Ahmad Mukoffi² Poppy Indrihastuti³

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Jln Telaga Warna, Malang 65144

E-mail: imabere99@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian dengan memanfaatkan efek status sumber daya manusia mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah desa, memahami efek penggunaan teknologi informasi tentang status keterangan keuangan pemerintah desa untuk memahami dampak penggunaan teknologi informasi atas status laporan keuangan pemerintah desa. penghindaran. Kualitas laporan keuangan pemerintah desa dipalsukan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti secara langsung melakukan penelitian terhadap kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dan mendapatkan data penelitian dengan benar. Penelitian mewujudkan penelitian kuantitatif dengan dilaksanakan memakai metode survey, dengan memanfaatkan sampel populasi dan menggunakan kuesioner untuk teknik pengambilan data dasar, bertujuan untuk menyelidiki hipotesis tentang interaksi atau pengaruh antar variabel. Penelitian ini berkaitan dan berpengaruh juga meliputi status sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan upaya menghindari kecurangan atas status arahan keuangan pemerintah desa yang ada di desa tlekung kota batu. Sumber data ini memanfaatkan penelitian data primer, yaitu data yang ditemukan melalui kuesioner tentang variabel-variabel terkait berupa tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diajukan peneliti. Penelitian ini peneliti menggunakan kiat dengan pendekatan kuantitatif.

Kata Kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Upaya Menghindari Kecurangan, Dan Kualitas Laporan Keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah adat. Aldeia yaitu satuan masyarakat hukum yang mempunyai aras wilayah dan berhak mengelolah dan menjunjung kegiatan pemerintahan dengan meliputi gagasan masyarakat dan penduduk. Hak tradisional untuk menyetujui dengan menghormati di sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa melambangkan tatanan pemerintahan terkecil di Indonesia, semua ini tidak terlepas dari faktor manusia, manusia merupakan salah satu faktor produksi, merupakan faktor terpenting dan utama dalam sistem atau tatanan instansi. faktor-faktor ini sangat rumit di sini, Harus memelihara, membimbing atau membangun ke dalam semua aspek hal.

Mengingat semakin tingginya tuntutan lembaga publik pusat dan daerah, khususnya masyarakat, akan akuntabilitas, maka sangat menarik untuk mengkaji laporan keuangan pemerintah desa. Tuntutan akuntabilitas publik yang semakin meningkat membuat pemerintah desa dengan memberikan informasi yang baik untuk publik, salah satunya adalah pelaporan keuangan. Selain itu, pemerintah desa juga adalah faktor terpenting dalam pembangunan suatu daerah, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Laporan keuangan merupakan suatu metode dengan keterangan dan penjelasan untuk menentukan kinerja perusahaan. Karena arahan keuangan proporsional adalah laporan keuangan yang sinkron oleh kriteria keuangan akuntansi. Artinya, laporan keuangan yang memberikan laporan yang profesional dan transparan (Mulyadi dan Puradiredja, 1998: 3). Sebagai pengendali struktur pengendalian, manajemen sangat bertanggung jawab atas setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan di bawah kepemimpinannya selama periode waktu tertentu. Tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham (pemilik) agar laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dapat menyajikan dengan benar. Namun, masih banyak perusahaan di dalam negeri atau luar negeri yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara wajar.

Laporan keuangan pemerintah berguna dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang menggunakan subjek dalam peninjauan untuk mengambil ketentuan juga perumusan strategi. laporan tersebut berguna kalau data keterangan dimanfaatkan oleh pengguna dan jika pengguna mengakui keterangan yang tertera. Menurut (Suwarjono 2014), laporan keuangan harus berguna untuk pengguna, sebagaimana laporan untuk memiliki nilai.

Keterangan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan untuk dasar pengambilan Implementasi. Maka, dengan laporan yang diperoleh di laporan keuangan pemerintah desa harus produktif cocok dengan kepentingan penggunaan. Dalam penelitian Nurlillah (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi dapat berguna jika dapat didukung oleh pihak keputusan. Karena itu, pemerintah desa harus mengamati informasi dalam penyampaian informasi keuangan adalah tujuan dari awal, pengawasan dengan pengambilan keputusan. Husna (2013), Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern.

Dalam menjalankan kegiatan tersebut, pemerintah desa wajib mengembangkan dan mempunyai teknik pengelolaan intern yang teratur, sehingga tidak terjadi banyak persoalan korupsi, kecurangan keuangan desa, pemborosan biaya dan laporan keuangan pemerintah desa yang tidak berkualitas, salah satunya. yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya teknologi informasi dan upaya pencegahan penipuan.

Sektor bisnis (bisnis) dan sektor publik (instansi pemerintah) bukan dapat dipisahkan dengan cara penipuan yang menunaikan dari pihak-pihak organisasi atau di luar organisasi. Bagian publik, penipuan sangat banyak terjadi daripada di sektor bisnis karena sistem manajemen keuangan pemerintah yang terpusat. Akan tetapi, sejak reformasi, Pemerintah menuntut keterbukaan dan akuntabilitas. Sebab, Pemerintah berusaha melaksanakan berbagai regulasi dengan memperkuat struktur lembaga keuangan serta mencegah dan menangani kecurangan di pemerintahan.

Penipuan atau disebut dengan fraud menjadi mengenai ini sedang ramai dibahas di Indonesia. Penipuan melibatkan kesalahan penyajian fakta yang berencana mendapatkan laporan yang salah atau untuk mendapatkan manfaat finansial yang tidak sah. Kekeliruan yang disengaja atas suatu perihal yang disembunyikan penunjuk untuk

merayu orang lain untuk melakukan hal yang merugikan mereka kebanyakan suatu kelalaian, juga sebagian keadaan (terutama yang dilaksanakan dengan sengaja) dapat menjadi kezaliman. Kekeliruan/misrepresentation (misstatement) yang ceroboh/tidak diperhitungkan dan tidak dapat dipercaya dapat mengakibatkan orang untuk bertindak. Kerugian juga muncul sebagai dampak dari pengetahuan tentang informasi atau penyampaian yang salah (distorsi), kerahasiaan realita, atau penyajian gegabah/tidak diperhitungkan dan berpengaruh satu sama juga merugikan dirinya.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengatakan korupsi yakni tindakan illegal melakukan dengan berencana sasaran (kecurangan dan pelaporan palsu untuk yang lain), kelakuan dari pihak dalam atau di luar pihak untuk manfaat pada diri sendiri dan merugikan anggota secara serentak meskipun bukan. Dengan demikian, penipuan mencakup semua jenis dapat konsentrasi untuk manusia dan tergoda bagi yang lain untuk mengambil manfaat, dengan nasihat dan tidak benar untuk tuntutan kejujuran, dengan mencakup seluruh bentuk dan tak beraturan, taktis dan semua metode salah. ACFE membagi fraud menjadi tiga macam atau jenis tindakan.

Tindakan kecurangan dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Banyak laporan kasus penipuan yang menyangkut orang tidak bertanggung jawab, maupun di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Macam-macam upaya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, untuk memungkinkan selaku penuh lembaga penegak hukum sebagai Kementerian Publik, Pengadilan dan Kepolisian. Selama satu dekade terakhir, pemerintah juga membangun dengan memunkingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi.

Tetapi hasilnya diperoleh tidak sesuai dengan keinginan, dimana Indonesia masih menempati peringkat 10 negara terkorup di dunia (Kompas.com: Selasa, 19 Agustus 2014).

Peneli Najah Ningrum (2013) melafalkan variabel yang menularkan keinginan terjadinya curang untuk pelayanan DIY, dalam penelitian ini menentukan hingga penerapan aturan, efektivitas pengendali intern, keadilan diseminasi, keadilan formalitas, tata usaha yang beretika, kewajiban lembaga memiliki pengaruh mempengaruhi. negatif pada penipuan dan asimetri - informasi memiliki efek positif pada penipuan. Pramudita (2013) melakukan survei di Pemerintah Kabupaten Salatiga, hasil penelitian menentukan bahwa cara pimpinan, metode pengelolaan intern, kecukupan ganti rugi, dengan etika mempengaruhi atas kecurangan, meskipun kewajiban organisasi dan penerapan hukum bukan pengaruh pada penipuan. Penelitian Fauwzi (2011) menentukan efektivitas pengendalian intern dengan kejujuran tata usaha sangat berdampak mengenai tren kecurangan akuntansi, meskipun kecukupan pampasan juga tanpa berpengaruh untuk kecenderungan kecurangan akuntansi. Sementara itu, penelitian Kusumastuti (2012) menentukan efektivitas pengendalian intern, kecukupan pampasan, kepatuhan mengenai tata cara akuntansi, asimetri informasi tidak dampak pada tren kecurangan akuntansi, sementara itu moralitas tata usaha mempengaruhi substansial, berpengaruh pada tren penipuan akuntansi. Mengenai peneliti menunaikan oleh peneliti dahulu tentang faktor-faktor yang berpengaruh kecurangan akuntansi (fraud), peneliti juga melakukan serta menggali persepsi pegawai dinas bagian pemerintah. Akhirnya peneliti juga membandingkan

dengan penelitian sebelumnya pada objek berbeda. Faktor-faktor tersebut mewujudkan efektivitas pengendalian intern, budaya organisasi, kecukupan kompensasi, kepatuhan terhadap aturan, kesaksamaan distributif, kesaksamaan prosedural, dan komitmen organisasi.

Mengenai pernyataan latar belakang tercantum dan peneliti juga tertarik untuk meneliti. alhasil penulis memberikan judul penelitian “*Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa Dalam upaya menghindari kecurangan di Desa Tlekung*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas Sumber daya manusia atas kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
2. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi atas kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

3. Apakah terdapat pengaruh dalam upaya menghindari kecurangan atas kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh kualitas Sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa
2. Untuk memahami pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa
3. Untuk memahami pengaruh dalam upaya menghindari kecurangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam upaya menghindari kecurangan.

2. Bagi pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dan memberikan masukan bagi instansi pemerintahan dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai contoh referensi dan masukan, meningkatkan ilmu pengetahuan, juga dapat menjadi rujukan atau kajian bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Amrizal. "Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor Internal" *Artikel*. Jakarta: 2004. Dari [http:// www.pdf.com](http://www.pdf.com) (diakses pada 16-04- 2021)
- Bolton, J Richard. Hand, J David. "Statiscal Fraud Detection: A Riview ". *Statiscal Science Journal*. Vol.17, No 3, 2002, pp 235-255 dari [http:// www.jstor.org](http://www.jstor.org) (diakses pada 13-04-2021)
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*, 8(1), 34–48.
- Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), Doi 10.24964/ja.v5i2.270 88-98. SSN: 2088-768X | e.
- Ghozali, Iman. "Aplikasi Analis Multivariate dengan Program SPSS". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2005
- Hamid, Abdul dkk. "Pedoman Penulisan Skripsi". Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2007.
- Iqbal, Muhamad." *Pengaruh tindakan pencegahan, pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010.
- Kadek Siska Agusyani, E. S. dan M. A. W. (2016). Pengaruh Whistleblowing System Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *E-JournalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(3).
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia,

- Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290–1318.
- Komarasari, W. (2017). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Prodi Akuntansi UPY*.
- Rachmawati, A. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan. (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*).
- Rozmita, Y. R. D., & Apandi, R. N. N. (2012). Gejala fraud dan peran auditor internal dalam pendeteksian fraud di lingkungan perguruan tinggi (studi kualitatif). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi*, 15.
- Sembiring, F. L. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *JURNAL AKUNTANSI*, 1(1).
- Siti Chodijah dan Nurul Hidayah. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*, 8(1), 34–48.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01).
- Tjiptoherijanto, P. (2001). Proyeksi penduduk, angkatan kerja, tenaga kerja, dan peran serikat pekerja dalam peningkatan kesejahteraan. *Majalah Perencanaan Pembangunan*, 1(2), 1–10.
- Widiyastuti, M., & Pamudji, S. (2009). Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

(FRAUD). *Value Added/ Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2).

- Novianti, Suzy. "Skeptisme Profesionalisme Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan". *Accounting Conference*. 2007. (diakses pada 16-04-2021)
- Ramarya, Tri. "Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) Laporan Keuangan Auditor Internal". *Jurnal*. Dari <http://pdf.com> (diakses pada 16-04-2021)
- Rosandi, Raisya. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan". *Skripsi*. 2009.
- Sahari, Haryanto. Dudi, Kurniawan. "Peran Akuntan Publik dalam Mendeteksi dan Mencegah *Fraud*". *Economics Business and Accounting Riview*. Depok. 2007.
- Sunarso, Siswanto. "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Artikel*. September 2007. dari <http://beritaindonesia.com>. (diakses pada 16-04-2021)
- Theodorus M. Tuanakotta. "*Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Uyanto, Stanislaus "*Pedoman Analisis Data dengan SPSS*". Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009.
- Umar, Haryono. "Komisi Pemberantasan Korupsi". *Artikel Workshop*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009
- Widjaja, Amin Tunggal. "*Forensik Audit Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan*", Harvarindo. Jakarta 2009.
- Wahyana, Mettoe. "Kenapa Orang Melakukan Fraud". *Artikel*. Oktober 2008. dari <http://www.oggix.com> (diakses pada 16-04-2021)